

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Telp. (0342) 801201 email: sekda@blitarkab.go.id

Blitar, 11 November 2024

Nomor : B/050.03/1222/409.3.2/2024

Sifat : Penting

Lampiran : 3 (tiga) lampiran

Hal : Rancangan Teknokratis

Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029

Kepada

Yth. Sdr. Daftar Terlampir

di -

Tempat

Menindaklanjuti kegiatan Orientasi dan *Workshop* Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 yang telah diselenggarakan bulan Oktober 2024 serta mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 15 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah" dan ketentuan pasal 123 Ayat (2) yang berbunyi "Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan", maka untuk efektivitas waktu penyusunan Renstra, Perangkat Daerah agar mulai menyusun Rancangan Teknokratis Renstra PD.

Proses teknokratik dalam penyusunan Renstra PD merupakan proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Penyusunan rancangan teknokratik Renstra PD dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Mengacu pada Pasal 108 Permendagri 86 Tahun 2017, Renstra PD disusun oleh Tim Penyusun Perangkat Daerah yang pembentukannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah. Komposisi dan jumlah anggota Tim Penyusun bervariatif sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi, dengan komposisi minimal terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, dan seterusnya yang masing-masing terdiri dari Ketua dan Anggota. Tim dimaksud bertanggung jawab kepada Bupati dan bertugas:

- 1. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra PD;
- 2. mengumpulkan data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan untuk penyusunan Renstra PD;
- 3. menyusun Renstra PD sesuai tahapan penyusunan (rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir); dan
- 4. mengajukan rancangan akhir Renstra PD kepada Kepala Daerah melalui perangkat daerah fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk efisiensi waktu dan efektivitas penyusunan dokumen Renstra, bersama ini disampaikan hal-hal berikut.

- a. Perangkat Daerah agar mengirimkan Usulan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (format terlampir) kepada Kepala Bappedalitbang selambatnya 13 Desember 2024 sebagai bahan perumusan Keputusan Bupati Blitar tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pasca dilantiknya Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
- b. Perangkat Daerah agar menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun kelanjutan penyusunan Bab III hingga Bab VIII Penutup Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan bersamaan dengan dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 yang terhitung dimulai saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.

c. Untuk kebutuhan penyeragaman format Dokumen Renstra PD yang merupakan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati, maka penulisan dokumen disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Jenis dan Ukuran Kertas: F4 (215mm x 330mm) 80 gsm;
- b) Batas Pengetikan (Margin):

Atas : 2 cmKiri : 3 cm

Bawah : 2 cmKanan : 2 cm

- c) Jenis dan Ukuran Huruf (Font):
 - Jenis: Bookman Old Style.
 - Ukuran: Judul Bab 14pt (bold center), Isi dokumen 12pt.
- d) Spasi Baris: 1,5 spasi.
- e) Header dan Footer:
 - Header: kosong (tidak diisi).
 - Footer: diisi halaman sesuai bab (font Bookman Old Style 12 pt).
 Contoh: I-1, IV-8, dst.
- d. Rancangan Teknokratik Renstra Perangkat Daerah sebagaimana huruf b, disampaikan ke Kepala Bappedalitbang paling lambat 13 Desember 2024 untuk selanjutnya dilakukan verifikasi awal oleh Bappedalitbang.
- e. Pedoman terkait penyusunan Rancangan Teknokratis Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat diunduh di https://linktr.ee/RantekRenstraPD2529 BlitarKab.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

an. BUPATI BLITAR SEKRETARIS DAERAH,

\${ttd}

Drs. IZUL MAROM, M.Sc. Pembina Utama Madya NIP. 196506031990021002

Lampiran I Surat Dinas

Nomor : B/050.03/1222/409.3.2/2024

Tanggal: 11 November 2024

Daftar Tujuan Surat

- 1. Inspektur Kabupaten
- 2. Kepala Dinas Pendidikan
- 3. Kepala Dinas Kesehatan;
- 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 6. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar;
- 7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8. Plt. Kepala Dinas Sosial;
- 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 15. Kepala Dinas Perhubungan;
- 16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 19. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 20. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 22. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
- 23. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 24. Sekretaris DPRD;
- 25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 26. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 27. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- 28. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 30. Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
- 31. Camat Sutojayan;
- 32. Camat Wlingi:
- 33. Camat Talun;
- 34. Camat Garum;
- 35. Camat Srengat;
- 36. Camat Kanigoro;
- 37. Camat Kademangan;
- 38. Camat Nglegok;
- 39. Camat Kesamben;
- 40. Camat Selorejo;
- 41. Camat Ponggok;
- 42. Camat Wonodadi:
- 43. Camat Sanankulon;
- 44. Camat Bakung;
- 45. Camat Wonotirto;
- 46. Camat Panggungrejo;

- 47. Camat Wates;
- 48. Camat Binangun;
- 49. Camat Doko;
- 50. Camat Selopuro;
- 51. Camat Gandusari;
- 52. Camat Udanawu;

Lampiran II Surat Dinas

Nomor : B/050.03/1222/409.3.2/2024

Tanggal: 11 November 2024

Blitar, 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR XYS

Jl	
Telp. (0342) XXXXXX email:	

Nomor : B/050/ /409.3.2/2024 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Kepala Bappedalitbang
Lampiran : 1 (satu) berkas di Hal : Usulan Tim Penyusun Tempat

Renstra Tahun 2025-2029

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Tanggal Nomor ...Hal bersama ini disampaikan usulan Tim Penyusun Renstra (nama Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA,
<u>Nama</u> Pangkat NIP

USULAN TIM PENYUSUN RENSTRA (NAMA PERANGKAT DAERAH)... TAHUN 2025-2029

(Pokja) I Anggota : 1.

2. dst

Kelompok Kerja : Ketua :

(Pokja) II

Anggota : 1.

2. dst

Kelompok Kerja : Ketua :

(Pokja) III

Anggota : 1. 2.

z. dst

dst

Catatan:

- a) Jumlah Pokja menyesuaikan kebutuhan Perangkat Daerah.
- b) Anggota dalam tiap pokja menyesuaikan kebutuhan Perangkat Daerah.
- c) Khusus Dinas Kesehatan, struktur Tim Penyusun Renstra dapat dilakukan penyesuaian karena harus melibatkan Unit Khusus RSUD. Misalnya, ditambahkan jabatan Wakil Ketua maupun Sekretaris Tim yang dapat terdiri dari unsur Dinkes & RSUD.

Lampiran III Surat Dinas

Nomor : B/050.03/1222/409.3.2/2024

Tanggal: 11 November 2024

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2025-2029

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Dokumen Renstra PD sekurangnya dengan sistematika sebagai berikut.

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah periode ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 dengan format sebagai berikut.

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah *)...... Kabupaten Blitar

	Indikator Kinerja sesuai No. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasi	Rasio Capaian pada Tahun ke-											
No.		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah *)....... Kabupaten Blitar

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					sio ant Angga		Rata-rata Pertumbuhan				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
17.1																l .	

Keterangan:

- diisikan dengan nama Perangkat Daerah.
- *) diisikan dengan nama rerangkat Dasa...
 **) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah.

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel 2.3.2, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel 2.3.2, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisis Bab IV RPJMD terutama masalah Pembangunan di Kabupaten Blitar.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/ kota;
- 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.1 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tuiuan	Sacaran	Indikator	Target Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke							
NO Tujuan	Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sasaran	1	2	3	4	5			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel 5.1.1

Tabel 5.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (Diisi	dengan visi RPJMD periode be	rkenaan)	
MISII : (Diisi	dengan misi RPJMD periode be	erkenaan)	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1. Sasaran 1.1	Strategi 1.1	1. Arah Kebijakan 1.1
	2. Sasaran 1.2	1. Strategi 1.2	2. Arah Kebijakan 1.2
Tujuan 1	3. Dst	2. Dst	3. Dst
	1. Sasaran 2.1	1. Strategi 2.1	1. Arah Kebijakan 2.1
	2. Sasaran 2.2	2. Strategi 2.2	2. Arah Kebijakan 2.2
Tujuan 2	3. Dst	3. Dst	3. Dst
Dst	Dst	Dst	Dst
MISI II : (Diisi de	ngan misi RPJMD periode berk	enaan)	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	1. Sasaran 1.1	1. Strategi 1.1	1. Arah Kebijakan 1.1
Tujuan 1	2. Sasaran 1.2	2. Strategi 1.2	2. Arah Kebijakan 1.2
	3. Dst	3. Dst	3. Dst
	1. Sasaran 2.1	4. Strategi 2.1	1. Arah Kebijakan 2.1
Tujuan 2	2. Sasaran 2.2	5. Strategi 2.2	2. Arah Kebijakan 2.2
	3. Dst	6. Dst	3. Dst
Dst	Dst	Dst	Dst
Dst.			J

Tabel 5.1.1 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1.1

Tabel 6.1.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah *)......
Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kada	Program dan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Data Capaian pada Tahun			Targo	et Kin	erja Pro	gram	dan Kei	rangk	a Penda	naan			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Kode	Kegiatan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Awal Perencanaan	Tahun	thun ke-1 Tahun ke-2 T	Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1																			
	Sasaran 1		Program																
			Kegiatan																
			Subkegiatan																
	Sasaran 2		Program																
			Kegiatan																
			Subkegiatan																
			Dst																
Tujuan 2																			
	Sasaran 1		Program																
			Kegiatan																
			Subkegiatan																
	Sasaran 2		Program																
			Kegiatan																
			Subkegiatan																
			Dst																

Keterangan:

Kolom 5: Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Perubahannya

^{*)} diisi dengan nama Perangkat Daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta target Program Nasional maupun Provinsi.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.1, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada target Kebijakan Nasional dan Provinsi ditampilkan dalam Tabel 7.1.2.

Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target C	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
		Tahun 0	Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun Tahun ke 4 ke 5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Target Program Nasional dan Provinsi

No	Nama target	Indikato r Kinerja		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Ca	paian Set	iap Tahur		Kondisi Kinerja pada akhir periode	
	target	r Killerja	S	Tahun 0	Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5	RPJMD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

BAB VIII PENUTUP

Catatan:

Lebih detail mengenai informasi tabel-tabel Renstra Perangkat Daerah dapat mempedomani Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.